

TPPU PANJI GUMILANG

Bareskrim Temukan Kesesuaian Transaksi Keuangan

JAKARTA (KR) - Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Whisnu Hermawan menemukan kesesuaian hasil laporan analisis transaksi keuangan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Panji Gumilang.

Kesesuaian itu diperoleh hasil keterangan Panji Gumilang usai dilakukan pemeriksaan pada Senin (7/8), diakui olehnya bahwa semua transaksi terkait dengan keuangan di Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) harus berdasarkan perintah Panji Gumilang.

"Artinya beliau (Panji Gumilang) menyampaikan apa yang disampaikan oleh teman-teman PPATK ada kesesuaian, bahwa rekening pribadi APG (Panji Gumilang) digunakan untuk melakukan operasional terhadap yayasan tersebut," kata Whisnu di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (8/8).

Penyidikan dugaan TPPU ini dilakukan Dittipideksus Bareskrim Polri

berdasarkan hasil analisa transaksi keuangan dari PPATK yang menduga adanya dugaan tindak pidana yayaan, penggelapan, tindak pidana korupsi, dan pengaudan terkait penyalahgunaan zakat. Dari laporan itu, Polri melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan saksi-saksi, termasuk saksi ahli. "Kami telah mendalami beberapa saksi, di antaranya ada 14 saksi yang sudah diperiksa dan masih ada dua saksi lagi hari ini," tuturnya.

Kedua saksi yang diperiksa hari ini, lanjut dia, berasal dari YPI. Penyidik melakukan penelitian terkait dugaan pola transaksi tidak pidana pencucian uang baik secara struktur ataupun

diputarbalikkan maupun dengan cara mencampurkan proses aliran dana. Selain itu, penyidik juga melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait seperti PPATK, Kementerian Agama, Kejaksaan Agung, dan BPAK. "Tujuannya untuk mendalami apa yang menjadi masukan dari teman-teman PPATK," ujar Whisnu.

Adapun hasil pemeriksaan Panji Gumilang kemarin, kata dia, Panji Gumilang mengakui sebagai Ketua Dewan Pembina YPI melakukan atau pun menyampaikan bahwa semua transaksi terkait dengan keuangan YPI tersebut semua harus berdasarkan perintahnya.

"Kami menduga ada dugaan terkait tindak pidana yayaan dimana rekening APG yang jumlahnya ratusan digunakan untuk menerima dana bos, juga menerima aliran dana pendapatan yayasan, itu yang kami dalam," tambahna.

(Ant/Has)-f



KR-Istimewa

GEBYAR LELANG SERENTAK: PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) melaksanakan Gebyar Lelang Serentak BSI (Gebyar BSI) sebanyak 1.000 unit mulai 8 Agustus-9 September 2023 dengan target penjualan mencapai Rp 150 miliar. Seremoni dilakukan Direktur Utama BSI Hery Gunardi (tengah), Direktur Lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Joko Prihanto (kiri) dan Direktur Jenderal Penetapan Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Yagus Suyadi (kanan).

TAK ADA LAGI ISU PENUNDAAN

Menko Polhukam: Pemilu 2024 Sesuai Jadwal

JAKARTA (KR) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, tahapan Pemilu 2024 dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022.

"Tahun ini adalah tahun politik. Alhamdulillah Pemerintah berhasil memastikan sekurang-kurangnya sampai saat ini, sekurang-kurangnya sampai tahapan ini dan Insya Allah sampai tahapan akhir ke depan bahwa Pemilu 2024 itu jadi dilaksanakan sesuai kalender konstitusi," ujar Mahfud MD dalam Forum Diskusi Sentra Gakkumdu, sebagaimana dipantau secara daring melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (8/8).

Adapun pelaksanaan Pilpres akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024, sedangkan Pilkada jatuh pada 27 November 2024. Untuk itu, sambung Mahfud, tak ada lagi isu penundaan dan perpanjangan periode Pemilu 2024. Pasalnya, dampak yang akan ditanggung oleh konstitusi sangat berat apabila Pemilu tak berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan. "Bisa menimbulkan kekisruhan di bidang politik kita, kalau kita tidak bisa memastikan bahwa pemilu akan diselenggarakan dengan sungguh-sungguh dengan yang dijadwalkan," jelasnya.

Sebelumnya, pada Jumat (14/7), Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro menegaskan, Pemerintah tetap melaksanakan Pilkada Serentak pada 27 November 2024. "Pemerintah tetap sesuai dengan skenario Undang Undang bahwa Pilkada dilaksanakan pada November 2024," kata Juri di Jakarta.

Pada Kamis (14/7), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengusulkan Pemerintah dan penyelenggara Pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membahas opsi penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Menurut Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja sebagaimana dikutip dari laman resmi Bawaslu RI, opsi penundaan Pilkada Serentak 2024 patut dibahas karena pelaksanaannya beririsan dengan Pemilu 2024 dan ada pula potensi terganggunya keamanan serta ketertiban.

"Kami khawatir sebenarnya Pemilihan (Pilkada) 2024 ini karena pemungutan suara pada November 2024, yang mana Oktober 2024 baru pelantikan presiden baru tentu dengan menteri dan pejabat yang mungkin berganti. Karena itu, kami mengusulkan sebaiknya membahas opsi penundaan Pemilihan (Pilkada) karena ini pertama kali serentak," ujar Bagja.

(Ant/San)-d

PSS Sambungan hal 1

"Itulah mengapa saya senang dengan reaksi pemain, harapannya pertandingan ini bisa membawa kami ke arah yang baru, tidak hanya sebagai tim yang kompetitif, tapi sebagai tim pemenang," katanya. Sementara striker PSS Hokky Caraka mengaku tim telah berjuang dan kerja keras sepanjang pertandingan. Sebelum pertandingan melawan Persikabo, PSS

penuh dengan tekanan namun mereka membuktikan bisa keluar dan kembali memenangkan pertandingan. Tiga poin yang penting untuk menatap pertandingan berikutnya.

"Ini jadi bukti untuk supporter dan keluarga kami bahwa kami bisa. Mungkin sebelumnya kami belum bisa menemukan jalan yang benar," tegas Hokky.

(Yud)-d

Koperasi Sambungan hal 1

Terbesar Koperasi Konsumen (1.031 koperasi atau 50,7 persen)," jelasnya.

Pemerintah melalui Kemenkop UKM sampai 2024 menargetkan munculnya 500 Koperasi Modern. "Target DIY tahun ini ada 11 Koperasi Modern dan saat ini masih dilaksanakan pendampingan untuk pemenuhan kriteria Koperasi Modern. Jenis koperasi yang didorong menjadi Koperasi Modern adalah koperasi sektor riil, bukannya Koperasi Simpan Pinjam," ungkapnya.

Sedang Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Makro Kemenkop UKM Rully Nuryanto mengatakan, pemekaran koperasi merupakan salah satu strategi dari koperasi untuk

mengembangkan usahanya, dan juga menangkap peluang yang ada. Akan tetapi yang lebih penting memenuhi kebutuhan anggotanya.

"Spin off ini merupakan bagian dari restrukturisasi kelembagaan. Dimana untuk melakukan restrukturisasi setidaknya memiliki tiga tujuan. Pertama pengembangan bisnis koperasi itu sendiri, kemudian efisiensi, dan penyehatan koperasi. Jadi silakan melakukan pemekaran, sekali lagi dasarnya adalah kebutuhan anggota," paparnya.

Andi Ritamariani menegaskan, BKKBN fokus dalam program penurunan stunting.

(Vin)-f

Tersangka Sambungan hal 1

Ridduan juga mengikat kaki korban, lalu mendirikannya dan mendorong ke arah tembok di atas kasur. Selanjutnya Ridduan melakan mulut korban lalu melakukan sesuatu yang oleh penyidik disebut dengan istilah skin. Selanjutnya, Ridduan dan korban sempat beristirahat, korban duduk sambil kesakitan di bagian perut.

Kemudian Ridduan kembali melakukan skin, namun kali ini korban terjatuh. Ridduan lalu membalikkan tubuh korban dan menghubungkan Walyiin yang sedang berada di angrkringan dengan mengirim WhatsApp.

Setelahnya, Walyiin tampak datang ke lokasi dan masuk ke dalam kamar kosnya. Dalam reka ulang, tersangka juga disebut memperagakan saat mengecek leher korban. Diperkirakan untuk memastikan apakah pemuda tersebut masih hidup atau sudah tidak bernyawa. Adegan saat kedua tersangka keluar sambil membawa bungkusan plastik yang di dalamnya diperkirakan berisi potongan tubuh korban, juga diperagakan.

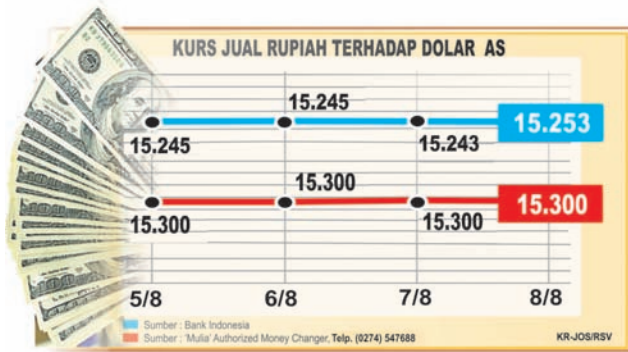
Dirreskrimum Polda DIY Kombes Pol FX Endriadi mengatakan, ada 49 adegan yang diperagakan kedua tersangka. Seharusnya ada tiga lokasi rekonstruksi, hanya sa-

ja karena situasi, rekonstruksi digelar di satu lokasi. "Peristiwa pembunuhan, pembuangan organ tubuhnya, kemudian kepala," tandasnya. Endriadi mengatakan, korban meninggal karena tindak kekerasan, namun tidak menyebut secara spesifik jenis kekerasannya. "Penyebabnya karena kekerasan ya. Mutilasi dilakukan oleh dua tersangka, dimutilasi dimasukkan dalam lima plastik. Dipotong di dalam, dimutilasi di dalam, kemudian dibawa di motor dan disebarkan," tandasnya.

Dikonfirmasi terkait adegan saat tersangka mengikat tangan dan kaki korban, apakah terkait aktivitas tidak wajar, Endri enggan menjawab. "Ini peristiwa pembunuhan, modusnya dengan tindakan kekerasan, salah satunya tadi ditali, dicekik, dipukul, kan kekerasan," ucapnya.

Terkait ide memutilasi, Endriadi menyebut bahwa datang dari kedua pelaku. "Idenya dari pelaku, keduanya. Itu yang bisa kami sampaikan," pungkas Endriadi.

(Ayu)-f



Prakiraan Cuaca				Rabu, 9 Agustus 2023		
Lokasi	Cuaca				Suhu C	Kelembaban
	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari		
Bantul					22-30	65-95
Slaman					22-29	65-95
Wates					22-29	65-95
Wonosari					22-30	65-95
Yogyakarta					22-30	65-95
 Cerah	 Berawan	 Udara Kabur	 Hujan Lokal	 Hujan Pelir		

Grafis : Arko

DITENGARAI MASUK KE PARPOL

PPATK Temukan Uang Kejahatan Rp 1 T

JAKARTA (KR) - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan, ada temuan uang Rp 1 triliun mengalir ke partai politik (parpol) dari tindak pidana kejahatan lingkungan. Ketua PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, temuan uang tersebut telah dilaporkan kepada KPU dan Bawaslu beberapa waktu yang lalu.

"Salah satu temuan PPATK yang sudah ditemukan ada Rp 1 triliun uang kejahatan lingkungan yang masuk ke parpol," ujar Ivan dalam Forum Diskusi Sentra Gakkumdu Jakarta, Selasa (8/8).

Menurutnya, PPATK kini tengah berfokus mendalami tindak kejahatan

keuangan lingkungan. Sebab, sampai saat ini tidak ada satu pun peserta pemilu yang bersih dari kejahatan tersebut.

"Karena PPATK sekarang sedang fokus pada *green financial crime*, ini yang ramai. Lalu apa yang terjadi? Nah, kami menemukan *kok* seperti ini tidak ada rekening dari para peserta kontestasi politik yang tidak terpapar," katanya.

PPATK setidaknya menemukan adanya risiko tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada dana kampanye di sejumlah provinsi. Wilayah tertinggi yang dominan terjadi TPPU adalah Jawa Timur (9), DKI Jakarta (8,90), Sumatera Barat

(7,91), Jawa Barat (7,57), Papua (7,30), Sulawesi Selatan (7,24) dan Sumatera Utara (7,02).

Selain itu, Ivan menyebut ada dana hasil tindak pidana yang selama ini mengalir sepanjang tahapan pemilu. Untuk itu, pihaknya kini sedang menelusuri hal tersebut.

"Ini artinya apa? Artinya dana hasil tindak pidana masuk sebagai biaya untuk kontestasi politik. Dalam konteks bersih, tugas dan kewenangan PPATK seberapa besar uang-uang yang berasal dari tindak pidana ini masuk ke kontestasi politik ini untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang," tutup Ivan.

(Ant)-f

MENTERI PAN-RB MINTA APKASI

Ciptakan Strategi Terbaik Pengadaan Guru

JAKARTA (KR) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas meminta agar Pemerintah Kabupaten bisa mengidentifikasi masalah dalam masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan dan pengadaan tenaga pendidik, dan kemudian menyusun rencana strategi.

"Melalui simposium ini, kita memiliki kesempatan berharga untuk bersama-sama mengidentifikasi permasalahan yang ada, mendiskusikan strategi terbaik, dan menghasilkan solusi inovatif," ungkap Menteri Anas dalam Simposium Bidang Pendidikan yang diselenggarakan Aso-

siasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Aula Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Jakarta, Selasa (8/8).

Dukungan itu diberikan dalam konteks pengadaan aparatur sipil negara (ASN) yang lebih baik di masa mendatang. Menurut Anas, rencana pengadaan ASN sebaiknya prediktif akan dinamika dan perkembangan dunia di masa depan, termasuk pesatnya perkembangan teknologi.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi dalam mengisi kekurangan jabatan guru dan tenaga kesehatan begitu kompleks.

Terlebih, karakteristik geografis Indonesia yang tentu berpengaruh pada mobilitas tenaga pendidik di berbagai daerah.

Kompleksitas tantangan itu, lanjut Anas, tentu bisa dihadapi dengan strategi yang matang. Dalam konteks pengadaan ASN, Kementerian PAN-RB berkomitmen untuk mengembangkan kebijakan dan strategi yang berkelanjutan guna memastikan bahwa proses pengadaan ASN berjalan efektif, efisien, dan berkualitas.

"Kebijakan ini terutama harus mampu memberikan solusi nyata terhadap tantangan dalam pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kesehatan," ujar Anas.

(Ati)-d

Sambungan hal 1

Hal tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Wahyu Imam Santosa saat persidangan putusan Ferdy Sambo, Senin (13/2/2023).

Putusan banding di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menguatkan putusan vonis mati tersebut. Sedangkan, terhadap terdakwa Ricky Rizal, majelis hakim tingkat pertama dan kedua menghukumnya selama 13 tahun penjara.

Untuk terdakwa Kuat Ma'ruf, majelis hakim PN Jaksel sebelumnya menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara. Hasil banding yang dilakukan di PT DKI Jakarta menguatkan putusan yang sama. Begitu juga terhadap terdakwa Putri Candrawathi semua diganjar hukuman 20 tahun penjara oleh hakim PN Jaksel dan di PT DKI Jakarta.

Pengajuan kasasi ini merupakan upaya Ferdy Sambo untuk lolos dari hukuman mati dalam kasus pembunuhan terhadap ajudannya sendiri, Brigadir J.

(Obi)-d

Sambungan hal 1

berbagai jalan, saluran, dan tempat produksi-produksi air lancar, maka dapat diduga sehatlah kota itu.

Tangan dan kaki kota adalah kemampuan kota mengelola dirinya secara dinamis sesuai dengan fasilitas yang dimiliki kota. Meliputi bangunan-bangunan, pabrik, mesin-mesin bergerak, dan berbagai konstruksi yang menyebabkan kota tersebut terlihat berdiri kokoh atau tidak. Dan seberapa jauh tangan-tangan fasilitasnya bisa menjangkau.

Hal yang tidak kalah pentingnya tentu saja mekanisme dan tempat pembuangan. Seperti manusia, kota juga punya limbahnya sendiri yang perlu dukungan tempat pembuangan. Sirkulasi kota yang sehat, perlu dukungan berbagai aktivitas perut yang konduusif, dan infrastruktur jalan, saluran dan terowongan. Atau pun tempat bagaimana limbah tersebut diisolasi, dikelola, agar mekanisme dan kinerja tubuh kota juga sehat. Tegasnya, tubuh kota kita sehat berimplikasi pada kesehatan tubuh kita.

Pada skala yang lebih kecil, rumah dan praktik hidup bersama lingkungan terdekatnya, merupakan representasi kesehatan paling nyata. Sehat di sini meliputi

Tubuh Kota

atau rumah. Struktur itu membentuk secara keseluruhan apa yang kemudian disebut sebagai Tubuh Kota.

Bagian kepala kota ada pada lokasi pimpinan dan para cerdik pandai, terletak pada pusat pemerintahan, pusat-pusat pendidikan tinggi, dan pusat-pusat riset. Jika kepala kota bisa berpikir jernih, melahirkan kebijakan dan gagasan-pemikiran yang cemerlang, akan sangat berpengaruh bagaimana tubuh kota bersikap, bertindak, dan mengelaborasi tubuhnya. Kalau kebijakan dan pemikiran dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan, dalam pretensi-pretensi kekuasaan dan ideologis, akan sangat berpengaruh pula terhadap kesehatan kota.

Bagian perut adalah bagaimana kota mengolah, mengatur, dan memfasilitasi kegiatan dan aktivitas kemasyarakatan. Jika perut kota baik dalam membantu dan memfasilitasi manusianya, seharusnya manusia akan lancar dan dimudahkan urusannya. Kerja perut kota didukung oleh jaringan saraf dan darah. Saraf kota adalah jalan-jalan yang saling terhubung, berbagai saluran dan terowongan yang memperlancar arus cairan yang bergerak. Sementara itu, darah kota adalah air. Jika